

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan, baik secara fisik maupun non fisik dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang No.32 dan 33 Tahun 2004, yang intinya berfokus kepada peralihan sistem pembangunan terdesentralisasi, dimana setiap daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Semangat otonomi daerah telah mewarnai pendayagunaan potensi ekonomi daerah, hal ini dimaklumi karena asumsinya daerah otonom yang memiliki potensi ekonomi yang kuat, mempunyai peluang yang besar dalam menggali dan mengembangkan perekonomian daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya daerah otonom mempunyai kemampuan lebih dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pelaksanaan pembangunan.

Realita yang ada menunjukkan, bahwa banyak daerah otonom yang kebijakan pembangunan ekonominya didasarkan pada keunggulan komparatif dengan kompetensi dan keunggulan disetiap daerah, misalnya perekonomian daerah yang berbasis pada hasil tambang, hutan, pertanian, perikanan, industri,

perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Untuk lebih mengoptimalkan upaya pengembangan perekonomian daerah, diperlukan inovasi atau prakarsa serta strategi pengembangan ekonomi bagi masing-masing daerah.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Secara luas pariwisata juga dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan, pembangunan pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994).

Yoeti (2007) menambahkan alasan Pentingnya pengembangan pariwisata pada suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut, dalam hal keuntungan dan manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat daerah setempat. Apabila usaha pariwisata dikembangkan dengan baik dengan sendirinya akan memberikan dampak positif bagi daerah berupa penerimaan pajak dan retribusi daerah, penyediaan kesempatan kerja dan memperkecil angka pengangguran, serta peningkatan bagi perekonomian setempat yang dapat menimbulkan permintaan baru terhadap hasil-hasil pertanian, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga, kerajinan dan pertenunan, akibat pengeluaran (uang yang dibelanjakan wisatawan) di Daerah Tujuan Wisata.

Kegiatan pariwisata saat ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat modern seiring dengan meningkatnya tuntutan aktivitas manusia yang semakin padat, mendorong masyarakat modern untuk mencoba keluar dari rutinitasnya dengan harapan mendapatkan suasana baru yang berbeda dari kehidupan biasanya sebagai pelepas penat atau sekedar hiburan dari aktivitas yang kian padat, bahkan berwisata sekarang telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia.

Menurut *World Tourism Organization* (WTO), wisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lainnya. Sedangkan pariwisata menurut UU No. 10 Tahun 2009 Pasal 1 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dimana komponen utama dalam aktivitas pariwisata adalah obyek dan daya tarik wisata meliputi keadaan alam, flora, fauna, serta hasil karya manusia.

Oleh karena itu, aktivitas pariwisata juga merupakan usaha pemanfaatan berbagai bentuk sumber daya lingkungan, baik yang bersifat fisik biotis maupun budaya. Penekanan terhadap pengembangan pariwisata juga sangat terkait antara barang berupa obyek daya tarik wisata sendiri yang dapat dijual dengan sarana dan prasarana yang mendukungnya, seperti jalan, jembatan, perhotelan, restoran dan sarana penunjang lainnya.

Peran masyarakat, pemerintah dan swasta juga sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur terkait kebutuhan pariwisata. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa pemerintah berperan sebagai legislator dan regulator dalam perencanaan pengembangan pariwisata. Tidak hanya itu pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju dalam perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan stakeholders yang lain dalam memainkan peran masing-masing.

Namun demikian seringkali peran pemerintah kurang dipahami atau kurang diperlihatkan oleh pemerintah sendiri maupun pelaku lainnya dalam perencanaan dan implementasi program pariwisata tersebut dilapangan. Tidak jarang pula jalinan kerjasama antar lintas sektoral di instansi pemerintah yang bertujuan untuk memacu kemajuan pariwisata masih lemah. Akibatnya, kinerja industri pariwisata secara keseluruhan menjadi rendah.

Hingga saat ini masih banyak daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata yang besar, tetapi tidak di dukung oleh penyediaan sarana dan prasarana penunjang wisata seperti airport, pelabuhan, jalan raya, jembatan, penyediaan air bersih, tenaga listrik, dan sarana telekomunikasi yang masih memprihatikan (Yoeti, 2007).

1.2 Rumusan Masalah

Implikasi diberlakukannya sistem desentralisasi telah membuka peluang bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi cukup besar dalam pengembangan pariwisata karena memiliki alam yang indah. Dilihat dari data jumlah objek wisata yang ada pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu kabupaten yang memiliki jumlah potensi objek wisata yang cukup banyak dan cukup beragam yaitu berjumlah 135 objek wisata yang terdiri dari objek wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya (lampiran 1).

Sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), potensi kepariwisataan di Kabupaten Tanah Datar telah memiliki daya tarik cukup kuat bagi kunjungan

wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara karena dilihat dari sisi produk wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang cukup beragam, selain potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah juga terdapat potensi atraksibudaya masyarakat yang berupa kesenian-kesenian rakyat, permainan rakyat, upacara adat, legenda/cerita rakyat yang dapat ditampilkan untuk memperkayapengalaman wisatawan yang datang ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini seharusnya mampu menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah daerah pada khususnya, untuk memperbaiki dan membawa sektor pariwisata daerah menjadi lebih baik.

Saat ini jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar masih mengalami naik turun. Menurunnya jumlah kunjungan tentunya disebabkan berbagai hal dan kendala yang mungkin dihadapi dalam pengembangan objek wisata yang ada, baik dalam pengelolaan maupun dalam pemanfaatannya. Selain itu kebakaran yang pernah terjadi pada objek wisata Istana Pagaruyung juga ikut mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten ini, serta banyaknya kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat yang saat ini juga sedang giat-giatnya mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sehingga dapat menjadi pilihan destinasi lain bagi wisatawan.

Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah apalagi di era otonomi daerah seperti saat ini dimana setiap daerah dituntut untuk mampu menggali dan mengembangkan setiap potensi daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan daerahnya. Disinilah peran pemerintah sebagai ujung tombak dari implementasi otonomi daerah dituntut harus kreatif dan

inovatif dalam menciptakan berbagai peluang pendapatan daerah dan meningkatkan berbagai potensi disetiap sektor.

Untuk itu peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan ataupun perencanaan terkait pengembangan pariwisata sangatlah penting sehingga potensi pariwisata yang ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam upaya peningkatan pendapatan bagi daerah dan juga masyarakat khususnya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah konsistensi antara rencana dan implementasi, karena itu monitoring dan evaluasi harus terus dilakukan.

Beranjak dari pemikiran dan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui :

1. Bagaimana kondisi dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan pariwisata?

Adapun judul yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu: “Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tanah Datar “.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan kondisi dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar.
2. Menganalisis kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan pariwisata.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademik:

Diharapkan dapat Menambah referensi dan pemahaman tentang pengembangan pariwisata khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata serta kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata.

2. Secara Teknis :

Sebagai bahan evaluasi dan informasi bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Tanah Datar tentang kebijakan pengembangan pariwisata serta pengelolaan objek wisata yang ada selama ini. Sehingga diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan rujukan dalam langkah mengambil kebijakan untuk pengembangan pariwisata selanjutnya.